

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Rizqi Atariansyah
rizqiata@gmail.com

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta (0274)387646

ABSTRACT

This research aims to find out the impact of assets inventory, internal control system, competence of human resources, utilization of information technology, understanding of the government accounting standard, accountability, and transparency on the quality regional financial reporting in the city of Yogyakarta and the districts in Special Region of Yogyakarta. The methodology used for this research was purposive sampling method with regional apparatuses in the form of offices, institutions, and services as the sample. The type of data in this research uses multiple regression from the software SPSS V.15. The result shows that internal control system, competence of human resources, utilization of information technology, understanding of the government accounting standard, and transparency impact positively on the quality regional financial reporting. Meanwhile, the assets inventory and accountability proves to not effectively impact the quality regional financial reporting.

Keywords : *assets inventory, internal control system, competence of human resources, utilization of information technology, understanding of the government accounting standard, accountability, and transparency.*

PENDAHULUAN

Suatu organisasi pada umumnya memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerbitkan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keadaan keuangan yang terjadi pada organisasi tersebut selama satu periode pelaporan. Organisasi yang menyusun pelaporan keuangan bukan hanya organisasi yang bergerak di sektor privat saja, organisasi yang bergerak di sektor publik juga melakukan penyusunan pelaporan keuangan. Suatu sistem pemerintahan juga termasuk sebagai organisasi yang bergerak di sektor publik sehingga melakukan penyusunan pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) setiap tahunnya memberikan penilaian berupa opini terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketika pelaporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, berarti dapat dikatakan bahwa pelaporan keuangan tersebut disajikan dan diungkapkan secara

wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) Yuliani dan Agustini (2015).

Walaupun opini dari BPK yang didapat provinsi Yogyakarta saat ini sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi masih terdapat beberapa catatan untuk opini tersebut. Salah satunya yaitu pengelolaan aset tetap daerah yang masih belum tercatat dengan baik dan semestinya yang terjadi dilapangan. Fakta yang terjadi dilapangan nilai aset sudah banyak yang berubah, jadi harus melakukan pengecekan kembali agar nilai aset tercatat dengan baik.

Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyediakan informasi keuangan secara jujur dan transparan kepada masyarakatnya serta akan menjadi pelaporan keuangan yang berkualitas. Terdapat beberapa kekayaan milik daerah, salah satunya adalah aset daerah, ada dua jenis aset yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan seperti kas, piutang, serta surat surat berharga. Aset non keuangan salah satunya adalah aset tetap (Febrianti, 2016).

Kolinug, dkk (2015) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang andal salah satunya adalah melalui pengelolaan aset milik daerah, pemerintah daerah harus mengelola aset dengan baik, aset tetap milik daerah merupakan upaya untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset serta melalui hal ini dapat mendukung fungsi dan peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk masyarakatnya. Selain itu juga menjadi langkah awal pemerintah daerah melakukan pengembangan kemampuan di bidang keuangan.

Masalah yang ada dalam hal aset daerah salah satunya adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan aset. Sebagai dampak dari masalah yang ada pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti jumlah aset yang dikuasai atau dikelolanya hal ini menurut Antoh (2017). Sehingga menyebabkan masalah di dalam pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap milik daerah, seperti yang dinyatakan Sugiyama (2013) inventarisasi aset merupakan kegiatan pendataan, pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi dari aset berwujud maupun aset tidak berwujud, Inventarisasi aset dilakukan pada waktu tertentu. Sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah perlu melakukan inventarisasi aset untuk mengetahui informasi dari seluruh aset yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh suatu daerah. Seluruh aset yang dimiliki oleh suatu daerah perlu diinventarisasi baik yang diperoleh dari investasi, hibah ataupun diperoleh dari yang lainnya. Penelitian terdahulu Trisnani, dkk (2017) menyatakan penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan artinya semakin baik pelaksanaan penatausahaan aset tetap akan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.

Pengelolaan aset tetap milik daerah tersebut jika dilakukan melalui inventarisasi yang baik juga harus diiringi dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik juga, maka dari itu di dalam instansi pemerintah sangat diperlukan SPI yang dapat menjadi acuan untuk menjalankan kegiatan di instansi pemerintah khususnya dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah. Widari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain Inventarisasi aset tetap dan SPI dalam menjalankan kegiatan didalam pemerintahan, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik untuk membantu menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas serta yang menjalankan sistem pengendalian intern supaya berjalan dengan baik. Armel (2017) menyatakan sumber daya manusia yang berkompeten diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang berkompeten mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Armel (2017) juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Jika sudah memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, untuk dapat mendukung hal tersebut perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi. Penjelasan peraturan pemerintah No. 56 tahun 2005 bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membagikan informasi keuangan kepada pelayanan publik yaitu semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Penelitian terdahulu Armel (2017) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Sedangkan pemilihan variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dipilih dengan alasan SAP tersebut berisi aturan atau prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga pemahaman pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SAP merupakan faktor penting baik untuk meningkatkan kualitas atau pembuatan pelaporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian terdahulu Wiraputra, dkk (2014) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari organisasi atas kewajiban-kewajiban yang telah dilakukannya. Jadi, pemerintah daerah semestinya harus melaporkan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdi (2017), jika akuntabilitas dikelola dengan baik, maka hal itu akan menghasilkan akuntabilitas yang baik dan juga berkualitas sehingga dalam proses pelaporan keuangan, bisa menjadi pelaporan keuangan yang baik dan juga bisa disajikan kepada publik. Ermino (2017) pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Setelah itu yaitu transparansi, disini transparansi merupakan keterbukaan suatu informasi. Pada dasarnya masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi, mengenai apa yang dilakukan pemerintah dan mengapa program atau suatu kebijakan tersebut dijalankan, dengan mengetahui program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maka, masyarakat dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Penelitian terdahulu Aswadi (2014) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan Purnamawati dan Sujana (2015) dan penelitian yang dilakukan Trisnani, dkk (2017). Perbedaan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Purnamawati dan Sujana (2015) dengan penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel pengelolaan inventarisasi aset tetap, akuntabilitas dan transparansi. Penelitian yang dilakukan Trisnani, dkk (2017) yang menjadi acuan karena salah satu hal yang paling berpengaruh didalam pelaporan keuangan adalah aset, selain itu juga studi kasus

yang dilakukan di penelitian sebelumnya adalah di kecamatan Buleleng sedangkan penelitian ini studi kasus pada organisasi perangkat daerah Provinsi Yogyakarta.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori *stewardship* menjelaskan mengenai seorang *steward* akan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama-sama dan apabila kepentingan seorang *steward* terdapat perbedaan maka *steward* akan mengajak bekerja secara bersama karena *steward* mementingkan kepentingan bersama dari pada mementingkan kepentingan pribadi (Davis *et al.*, 1997).

Inventarisasi Aset Tetap

Hal yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan salah satunya adalah pengelolaan inventarisasi aset tetap milik daerah, sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah perlu melakukan inventarisasi aset untuk mendapatkan seluruh data aset yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh suatu daerah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Trisnani, dkk (2017) yang membuktikan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan artinya jika pengelolaan inventarisasi aset tetap dijalankan dengan maksimal maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tangke (2015) yang membuktikan bahwa manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2016) yang mengatakan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₁ : Pengelolaan Inventarisasi Aset Tetap Milik Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu elemen penting didalam organisasi pemerintahan, dengan sistem pengendalian intern yang baik semua kegiatan yang ada di organisasi pemerintah akan berjalan dengan baik juga, salah satunya adalah di dalam pembuatan pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan berkualitas dan kualitas pelaporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah teruji terpercaya keandalannya.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan Armel (2017) yang membuktikan bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri, dkk (2015) yang membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Begitupun yang dilakukan oleh Widari (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₂ : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Didalam sistem pengendalian intern harus memiliki sumber daya manusia untuk membantu mewujudkan tujuan yang ada di dalam suatu lembaga pemerintahan, sumber daya manusia tersebut harus mempunyai kompetensi supaya sistem pengendalian intern didalam suatu lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang sebelumnya dilakukan Armel (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri dkk. (2015) yang mengatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) yang mengatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

H₃: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Selain pengelolaan inventarisasi aset, sistem pengendalian intern, dan sumber daya manusia hal lain yang perlu diterapkan didalam suatu lembaga pemerintahan adalah pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung kompetensi sumber daya manusia untuk memudahkan pekerjaannya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Armel (2017) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri dkk. (2015) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₄ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip berupa ketepatan waktuan dan disusun berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan syarat yaitu bentuk dan isi pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ada pada PP No 24 Tahun 2005.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Wiraputa, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2015) dengan hasil yaitu efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pemahaman terhadap SAP maka semakin tinggi pula kualitas dalam pelaporan keuangan pada pemerintah. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis

yang dapat diajukan adalah :

H₅ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas

Menurut Sulistiyani (2003) pemerintah yang *accountabel* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas pelaporan keuangan.

Ermino (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Aswadi (2014) juga melakukan penelitian ini yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan akuntabilitas yang baik maka akan timbul pertanggungjawaban yang tinggi, sehingga akan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang semakin baik pula dan hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₆ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi

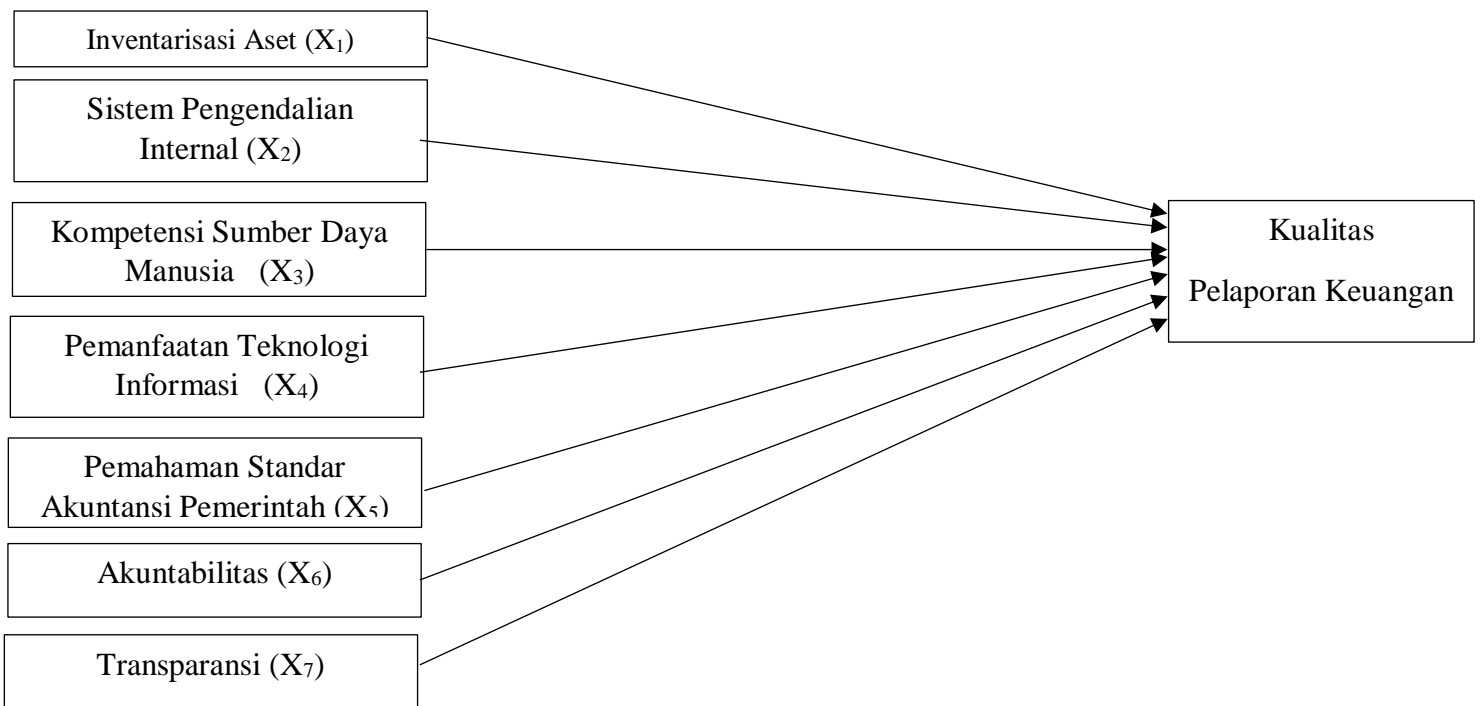
Berdasarkan teori *stewardship* yang memiliki asumsi bahwa pejabat OPD sebagai pelayan masyarakat harus menjunjung tinggi kejujuran. Sedangkan kejujuran merupakan acuan dari prinsip transparansi itu sendiri. Maka transparansi sejalan dengan teori *stewardship*. Suatu pelaporan keuangan dianggap transparan jika informasi yang ada dalam pelaporan keuangan tersebut disajikan secara terbuka. Dapat dikatakan bahwa pelaporan keuangan tersebut akan semakin berkualitas jika tingkat keterbukaan informasi yang terkandung di dalamnya semakin banyak. Sehingga jika semakin tinggi tingkat transparansi, maka kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aswadi (2014) memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ermino (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uraian diatas hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₇ : Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Model Penelitian

Model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas dinas, badan dan kantor.

Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu menggunakan data primer, data ini diperoleh dengan cara langsung dari sumbernya tanpa ada pihak perantara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner kemudian di dalam kuesioner ini berisikan pernyataan yang memiliki keterkaitan topik tentang inventarisasi aset, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelaporan keuangan.

Teknik Pengambilan Sampel

Menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Organisasi Pemerintah Daerah yang berbentuk dinas, badan dan kantor.

Sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang menjabat sebagai Kepala dinas, badan dan kantor, sekretaris dinas, badan dan kantor dan kepala bagian keuangan atau akuntansi. Serta minimal telah menjabat selama 1 (satu) tahun, dengan

pandangan bahwa sebagai responden telah memahami atau mengerti situasi dan keadaan di dalam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta responden juga terlibat di dalam melakukan pelaporan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan suatu pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden (Wintari dan Suardana, 2018). Kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil sampel Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang berbentuk kantor, badan dan dinas yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 3 kantor, 10 badan dan 62 dinas dengan peta distribusi yang terlihat dalam tabel 1 :

Tabel 1

Data Penyebaran Kuesioner

No.	Nama Kota / Kabupaten	Kuesioner Yang Dibagikan	Kuesioner Yang Kembali
1.	Kota Yogyakarta	45	42
2.	Kabupaten Sleman	45	45
3.	Kabupaten Bantul	45	45
4.	Kabupaten Gunung Kidul	45	39
5.	Kabupaten Kulon Progo	45	42
Total		225	213

Sumber : Data Primer

Kuesioner yang disebar sebanyak **225**. Gambar data sampel dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2

Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dikirim	225	100%
Kuesioner yang kembali	213	95%
Kuesioner yang tidak kembali	12	5%
Kuesioner yang dapat kembali dan diolah	210	93%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	3	1%

Sumber : Data Primer

Hasil Uji Statistik Deskriptif variabel penelitian pada tabel 3 adalah sebagai berikut

Tabel 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Teoritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Inventarisasi Aset	7-35	21	24-35	29,69
Sistem Pengendalian Internal	8-40	24	26-40	33,22
Kompetensi Sumber Daya Manusia	8-40	24	18-40	31,32
Pemanfaatan Teknologi Informasi	9-45	27	27-45	37,72

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	5-25	15	13-25	20,93
Akuntabilitas	6-30	18	18-30	24,62
Transparansi	8-40	24	24-40	31,52
Kualitas Pelaporan Keuangan	11-55	33	34-55	45,83

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas, variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel inventarisasi aset, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelaporan keuangan yang ada di OPD Kabupaten dan Kota di DIY tinggi.

Uji Validitas

Tabel 4
Uji Validitas

Variabel	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	Keterangan
Inventarisasi Aset	0,859	Valid
Sistem Pengendalian Internal	0,823	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,863	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,828	Valid
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	0,797	Valid
Akuntabilitas	0,715	Valid
Transparansi	0,862	Valid
Kualitas Pelaporan Keuangan	0,900	Valid

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas nilai *KMO* semua variabel di atas 0,5 maka seluruh butir pertanyaan semua variabel valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Inventarisasi Aset	0,850
Sistem Pengendalian Internal	0,848
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,916
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,863
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	0,881
Akuntabilitas	0,769
Transparansi	0,845
Kualitas Pelaporan Keuangan	0,930

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan keenam variabel dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang cukup tinggi.

Uji Normalitas

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 6 uji *kolomogorov-smirnov* dengan nilai signifikansi sebesar $0,058 > \alpha$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Inventarisasi Aset	,700	1,429
	Sistem Pengendalian Internal	,434	2,305
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,694	1,440
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,515	1,943
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	,441	2,268
	Akuntabilitas	,309	3,232
	Transparansi	,504	1,983

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 4.13 uji multikolinearitas menjelaskan bahwa data yang ada pada masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* secara keseluruhan < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas

		Sig.
		Std. Error
1	(Constant)	2,096
	Inventarisasi Aset	,102
	Sistem Pengendalian Internal	,965
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,217
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,932
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	,647
	Akuntabilitas	,266
	Transparansi	,477

Sumber : Output *SPSS V.15*

Tabel 8 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi secara keseluruhan variabel lebih besar dari 0,05 maka, data yang terdapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terkena heteroskedastisitas.

Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F)

Tabel 9
Hasil Uji-F

Model	Sig.
1 Regression Residual Total	.000(a)

Sumber : Output *SPSS V.15*

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi F $0,000 < \alpha$ $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas dan transparansi. secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Uji Koefisien Dterminasi (*Adjusted R²*)

Tabel 10
Hasil Uji *Adjusted R²*

Model	Adjusted R Square
1	.431

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,431. Hal ini berarti 43,1% variasi dari variabel kualitas pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel inventarisasi aset, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas dan transparansi. Sisanya 56,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji *t*)

Tabel 11
Hasil Uji *t*

	B	Sig.
1 (Constant)	8,093	.009
Inventarisasi Aset	.063	.487
Sistem Pengendalian Internal	.259	.024
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.183	.005
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.099	.034
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	.569	.001
Akuntabilitas	.009	.957
Transparansi	.180	.049

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan persamaan regresi adalah

$$Y = 8,093 + 0,063 X_1 + 0,259 X_2 + 0,183 X_3 + 0,099 X_4 + 0,569 X_5 + 0,009 X_6 + 0,180 X_7 + e.$$

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

Uji Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan tabel di atas variabel inventarisasi aset memiliki nilai signifikansi $0,487 > \alpha$ 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,063. Maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak.

Uji Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan tabel di atas variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi $0,024 < \alpha$ 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,259. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima.

Uji Hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan tabel di atas variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi $0,005 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,183. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H₃) diterima.

Uji Hipotesis 4 (H₄)

Berdasarkan tabel di atas variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi $0,034 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,099. Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H₄) diterima.

Uji Hipotesis 5 (H₅)

Berdasarkan tabel di atas variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai signifikansi $0,001 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,569. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H₅) diterima.

Uji Hipotesis 6 (H₆)

Berdasarkan tabel di atas variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi $0,957 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,009. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H₆) ditolak.

Uji Hipotesis 7 (H₇)

Berdasarkan tabel di atas variabel transparansi memiliki nilai signifikansi $0,049 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,180. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H₇) diterima.

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh inventarisasi aset, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasar pengujian dan analisis yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah :

1. Inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7. Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan antara lain :

1. Dalam penelitian ini dapat ditambahkan dengan menggunakan teknik wawancara supaya responden dapat memahami lebih dalam isi dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti.
2. Dalam penelitian ini masih terdapat instrumen di dalam kuesioner yang kadang menimbulkan bias karena terkadang responden dalam menjawab instrumen pertanyaan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang tidak ada pernyataan negatif.
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel organisasi perangkat daerah yang berbentuk kantor, dinas, badan dan hanya dalam satu wilayah provinsi.

Saran

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka, saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah :

1. Metode survey sebaiknya dilengkapi dengan teknik wawancara sehingga pengisian kuesioner menjadi lebih objektif.
2. Disarankan untuk menambahkan jumlah sampel yang digunakan, menggunakan wilayah yang lebih luas, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga diduga berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoh, A. E. 2017. "Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Volume 1, Nomor 2 (ISSN 2615-0425).
- Arep dan Tanjung. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPEC.
- Armel, R. Y. G. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *JOM Fekon*, Vol.4 No.1.
- Aswadi, Sri Ayu Wulandari. 2014. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang). *Skripsi*. Universitas Hassanudin Makassar.
- Bastian, I. 2007. "Audit Sektor Publik". Jakarta: Salemba Empat.
- BPK RI Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta www.yogyakarta.bpk.go.id. Diakses tanggal 15 April 2019 Pukul 20.40
- Cheung, E., Evans. E., & Wright. S. 2010. *An historical review of quality in financial reporting in Australia*. Emerald Group Publishing Limited, Pacific Accounting Review, Vol. 22 No. 2.
- Contrafatto, M. 2014. *Stewardship Theory: Approaches And Perspectives*. Emerald Group Publishing Limited, Accountability and Social Accounting for Social and Non-profit Organizations Advances in Public Interest Accounting, Vol. 17, 177_196.
- Dolinsek, T., Tominc, P., & Skerbinjek, A. L. 2014. The determinants of internet financial reporting in slovenia. Emerald Group Publishing Limited, *Online Information Review*, Vol. 38, No. 7.
- Ermino, Rendy. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau*, hal. 101-118.
- Evicahyani, Sagung Inten dan Nyoman Djinar Setiawina. 2016. Analisis Faktor- Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali*, hal 403-428.
- Febrianti, S. 2016. "Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya". *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 10 No. 1.
- Ghozali, I. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19". Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariandja, Marihat Tua Efendi, 2002, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Grasindo, Jakarta.

- Kolinug, M. S., Ilat, V., & Pinatik, S. 2015. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon". *Jurnal EMBA* 818 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 818-830.
- Key, A. 2017. *Stewardship theory: is board accountability necessary?*. Emerald Group Publishing Limited, *International Journal of Law and Management*, Vol. 59 Issue: 6, pp.1292-1314.
- Kurnianto, O. D. 2017. "Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. 2016. "Analisis Statistik Dengan SPSS".
Yogyakarta: Danisa Media.
- Ningtyas, Pravitasari Eka. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. Vol. 4, No. 1, hal 1-15.
- Nirwana, & Haliah. 2018. Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors. Emerald Group Publishing Limited, *Assian Journal of Accounting Research*. Vol.2 issue : 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Primayana, K.H., Atmadja, A.T., & Darmawan, N. A. S. 2014, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandaan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah(Studi Pada Pemerintahan Daerah kabupaten Buleleng)", *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi* , Vol.2 No. 1.
- Purnamawati, I. G. A., & Sujana, E. 2015. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah". *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1* (Vol. 3 No. 1).
- Saputra, Jhony. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, dan Pelaporan atau Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Sugijama, A. G. 2013. "Manajemen Aset Pariwisata". Bandung: Guardaya Intimarta.

- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 1, No. 1, hal13-26.
- Supit, P. T., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. 2017. “Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut PP No.27 Tahun 2014 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 276-285.
- Tangke, J. G., Halim., & Lucita, G. 2015. “Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar”. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 21 No. 1, April 2015/1-5.
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 11, No. 3 September 2017 Hal. 271 – 282.
- Triyanto, H. 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Inspektoran Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. 2015. “Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Bisnis & Ekonomi* , Vol. 14, No. 1.
- Wiraputra, Wayan Kusuma. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, hal 86-98.